

*Received : 22 Sept 2025*

*Accepted : 12 Okt 2025*

*Published : 23 Okt 2025*

---

## **KOLABORASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN KODIM 1207/PONTIANAK DALAM BIDANG KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN KUBU RAYA PROPINSI KALIMANTAN BARAT**

Junain Indra Ismana <sup>1</sup>

Arlan Siddha <sup>2</sup>

Titin Rohayatin <sup>3</sup>

*1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani*

Email Korespondensi :

### ***Abstract***

*Food security is a strategic issue in Indonesia, particularly in border regions where agricultural productivity and socio-economic resilience intersect with national defense imperatives. This study examines the collaboration between the Kubu Raya Regional Government and Kodim 1207/Pontianak in strengthening local food security. Employing a qualitative descriptive approach, data were collected through literature review, official documents, and in-depth interviews with government officials, military personnel, and community members. The analysis employs collaborative governance theory, focusing on communication, coordination, and collaboration as core dimensions. Findings show that collaboration has been realized through agricultural assistance, farmer mentoring, land intensification programs, and joint monitoring of food distribution. However, challenges remain in institutional alignment, resource limitations, and differences in operational culture between civilian and military actors. The study concludes that sustainable collaboration requires clear institutional frameworks, joint training, and integrated monitoring systems. Theoretically, this research contributes to the literature on civil–military collaboration in non-traditional security sectors, while practically offering policy recommendations for strengthening food security governance in borderland regions of Indonesia.*

***Keywords: Food security; Civil–Military collaboration; local governance; Kubu Raya; Kodim 1207.***

### **PENDAHULUAN**

Ketahanan pangan merupakan isu strategis nasional yang tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga terkait erat dengan stabilitas sosial, pembangunan ekonomi, dan pertahanan negara. Dalam konteks Indonesia, tantangan ketahanan pangan semakin kompleks akibat pertumbuhan

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

penduduk, alih fungsi lahan, perubahan iklim, serta ketergantungan pada impor komoditas tertentu. Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat menjadi wilayah penting karena memiliki lahan pertanian potensial sekaligus berada di kawasan strategis yang berdekatan dengan perbatasan negara. Kondisi geografis ini menempatkan ketahanan pangan sebagai isu yang tidak sekadar domestik, tetapi juga terkait dengan dimensi keamanan nasional.

Pemerintah daerah memiliki mandat untuk memastikan ketersediaan, distribusi, dan keterjangkauan pangan di tingkat lokal. Namun, keterbatasan anggaran, kapasitas teknis, dan infrastruktur sering kali membuat intervensi pemerintah daerah tidak optimal. Di sisi lain, Kodim 1207/Pontianak sebagai bagian dari TNI AD memiliki fungsi pertahanan teritorial, tetapi juga diberi mandat untuk terlibat dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), termasuk membantu program pembangunan nasional dan penanggulangan ancaman non-militer seperti krisis pangan. Keterlibatan TNI dalam bidang ketahanan pangan tidak hanya menambah kapasitas sumber daya, tetapi juga memperkuat legitimasi negara di tingkat akar rumput.

Fenomena kolaborasi sipil–militer dalam bidang ketahanan pangan sesungguhnya bukan hal baru. Sejak era Orde Baru, TNI dikenal aktif dalam program Bimas dan Inmas pertanian. Namun, dalam konteks otonomi daerah dan reformasi TNI, pola hubungan sipil–militer mengalami transformasi. Kolaborasi lebih diarahkan pada kemitraan yang sejajar, di mana pemerintah daerah menjadi leading sector dan TNI hadir sebagai mitra strategis. Konteks ini menjadi menarik untuk diteliti, terutama di Kubu Raya yang secara geografis dan sosial menghadapi tantangan ketahanan pangan sekaligus memiliki potensi besar melalui optimalisasi lahan pertanian.

Urgensi penelitian ini semakin kuat bila dikaitkan dengan kebijakan nasional. Pemerintah pusat menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020–2024 dan arahan Presiden mengenai penguatan lumbung pangan baru (food estate). Sinergi antara

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

pemerintah daerah dan TNI diharapkan mampu mempercepat pencapaian target ketahanan pangan, khususnya di daerah strategis seperti Kubu Raya. Namun, sejauh mana kolaborasi tersebut berjalan efektif, apa bentuk-bentuk konkret yang dilakukan, dan apa hambatannya, masih menjadi pertanyaan penting yang perlu dijawab.

Penelitian ini memiliki signifikansi teoritis maupun praktis. Dari sisi teoritis, penelitian ini memperkaya kajian tentang *collaborative governance* dengan menghadirkan studi kasus kolaborasi sipil–militer dalam isu non-tradisional seperti pangan. Dari sisi praktis, penelitian ini memberi masukan bagi pemerintah daerah, Kodim 1207/Pontianak, dan pemangku kepentingan lain untuk memperkuat tata kelola pangan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, rumusan masalah yang diajukan adalah: (1) Bagaimana bentuk kolaborasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya dan Kodim 1207/Pontianak dalam bidang ketahanan pangan?; (2) Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kolaborasi tersebut?; dan (3) Strategi apa yang dapat dilakukan untuk memperkuat kolaborasi di masa depan? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi fokus analisis yang akan dibahas pada artikel ini.

### *Kerangka Teori*

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah *collaborative governance* sebagaimana dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008), yang menekankan pada model kerangka kerja proses *collaborative governance* yang terdiri dari empat tahapan, yaitu:

1. *Starting Conditions* (Kondisi Awal), yang berfungsi untuk menjelaskan dua isu utama, yaitu ketidakseimbangan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pemangku kepentingan dan adanya insentif untuk berpartisipasi. Ketika sumber daya dan kekuatan antara pemangku kepentingan tidak seimbang, kerjasama dapat dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki sumber daya dan kekuatan yang lebih besar. Oleh karena itu, penting untuk memiliki komitmen dalam mendukung pemangku kepentingan yang lebih lemah. Selain itu, insentif juga diperlukan agar pemangku kepentingan yang kurang kuat dapat termotivasi untuk aktif dalam

*Received : 22 Sept 2025*

*Accepted : 12 Okt 2025*

*Published : 23 Okt 2025*

---

kerjasama. Terakhir, perlu ada langkah antisipatif terhadap potensi konflik dalam kerjasama, sehingga sejak awal harus dibangun rasa saling percaya di antara semua pihak.

2. *Facilitative Leadership* (Pemimpin fasilitatif), menurut Ansell dan Gash, menjelaskan bahwa dalam proses kolaborasi, terdapat kebutuhan akan peran kepemimpinan dari para pelaku. Hal ini penting untuk mempertahankan stabilitas interaksi, membangun kepercayaan di antara para pelaku, memastikan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, serta memfasilitasi diskusi dalam forum.
3. *Institutional Design* (Desain kelembagaan), merupakan pedoman dasar yang krusial dalam proses kolaborasi, dan karakter dari institusi tersebut harus bersifat transparan. Ansell dan Gash mendeskripsikan bahwa Desain Intitusional mengacu pada protokol dasar dan aturan-aturan dasar untuk kolaborasi secara kritis yang paling ditekankan adalah legitimasi prosedural dalam proses kolaborasi. Dalam proses kolaborasi yang harus ditekankan adalah pemerintah harus bersifar terbuka dan inklusif
4. *Collaborative Process* (Proses kolaboratif), adalah tahap pembangunan kerjasama yang dimulai dengan forum dialog langsung yang dilakukan secara konsensus. Model proses kolaborasi mengembangkan kolaborasi sebagai perkembangan tahapan. Gray dalam Ansell dan Gash mendefinisikan tiga tahapan proses kolaborasi antara lain problem setting (penentuan permasalahan), Direction Setting (penentuan tujuan), dan implementasi.

Selain itu, konsep ketahanan pangan yang dikemukakan oleh FAO (1996) digunakan sebagai landasan analisis, yang mencakup empat dimensi: ketersediaan, akses, stabilitas, dan pemanfaatan pangan. Dengan menghubungkan teori kolaborasi dan ketahanan pangan, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana sinergi antara pemerintah daerah dan Kodim dapat memengaruhi keempat dimensi tersebut, baik melalui intervensi langsung maupun dukungan struktural.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kodim 1207/Pontianak dalam bidang ketahanan pangan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat Pemda Kubu Raya, perwira Kodim, penyuluh pertanian, serta kelompok tani yang

*Received : 22 Sept 2025*

*Accepted : 12 Okt 2025*

*Published : 23 Okt 2025*

---

terlibat dalam program. Data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan resmi, dan literatur terkait.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga dengan triangulasi sumber (pejabat pemerintah, militer, masyarakat), triangulasi metode (wawancara, dokumen, observasi), serta konfirmasi informan (member checking). Pendekatan ini diharapkan menghasilkan temuan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

## **PEMBAHASAN**

Penelitian mengenai kolaborasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya dengan Kodim 1207/Pontianak dalam bidang ketahanan pangan dilakukan pada sejumlah lokasi strategis pertanian, di antaranya Desa Permata Jaya, Dusun Tanjung Wangi di Desa Rasau Jaya 2, Desa Kali Bandung, Desa Suka Lanting, dan beberapa kawasan pertanian di Kecamatan Teluk Pakedai serta Kecamatan Kubu. Wilayah-wilayah ini dipilih karena memiliki potensi lahan pertanian yang luas, termasuk lahan tidur yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kabupaten Kubu Raya sendiri merupakan salah satu daerah penyangga pangan penting di Kalimantan Barat, namun menghadapi tantangan berupa keterbatasan anggaran, minimnya sarana prasarana pertanian, dan rendahnya kapasitas penyuluh lapangan. Tema penelitian ini adalah menelaah bagaimana pemerintah daerah dan Kodim 1207 membangun kerja sama untuk meningkatkan produksi pangan, sekaligus mengatasi hambatan struktural dan teknis yang muncul dalam praktik. Data diperoleh melalui wawancara dengan pejabat dinas pertanian, perwira Kodim, Danramil, Babinsa, penyuluh pertanian, serta kelompok tani, dan dilengkapi dengan observasi lapangan yang menyoroti praktik pendampingan, pemanfaatan lahan, hingga distribusi pangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi awal atau *starting conditions* menjadi faktor penting yang membentuk arena kolaborasi. Dari sisi peluang, Kubu Raya

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

memiliki lahan potensial yang cukup luas untuk digarap, termasuk ratusan hektare lahan tidur yang bisa dijadikan sumber produksi baru. Sejumlah lokasi seperti Desa Permata Jaya dan Suka Lanting menunjukkan contoh optimalisasi lahan yang berhasil dilakukan berkat kerja sama pemerintah daerah dan Babinsa yang memobilisasi masyarakat. Selain potensi lahan, terdapat pula modal sosial berupa pengalaman kerja sama sebelumnya antara Kodim dan Pemda dalam bidang pembangunan wilayah dan penanggulangan bencana. Modal ini menjadi dasar kepercayaan awal bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan kolaborasi di sektor ketahanan pangan.

Namun, kondisi awal juga diwarnai oleh berbagai kendala. Informan dari Dinas Ketahanan Pangan menegaskan bahwa jumlah penyuluh pertanian di lapangan masih terbatas sehingga pendampingan petani tidak merata. Hal ini sering kali membuat Babinsa harus mengambil alih sebagian fungsi penyuluhan. Dari sisi pendanaan, anggaran daerah untuk program pangan masih terbatas, sehingga sebagian besar kegiatan bergantung pada dukungan Kementerian Pertanian atau inisiatif Kodim dalam memfasilitasi kebutuhan teknis. Selain itu, belum adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) teknis di tingkat kabupaten menyebabkan pembagian tanggung jawab masih sering diatur secara informal. Kondisi campuran ini antara peluang lahan dan legitimasi TNI dengan keterbatasan SDM serta dukungan anggaran menjadi titik awal yang menentukan arah kolaborasi.

Dimensi kepemimpinan fasilitatif atau *facilitative leadership* muncul sebagai penggerak utama dalam proses kolaborasi. Penelitian menemukan bahwa kepemimpinan di tingkat kabupaten bersifat ganda dimana Bupati dan Dinas Pertanian bertindak sebagai pemimpin kebijakan, sementara Dandim 1207 berperan dalam mobilisasi sumber daya militer untuk mendukung program.

Kepemimpinan ini memfasilitasi koordinasi lintas sektor, misalnya melalui rapat bersama sebelum musim tanam atau evaluasi pasca-panen. Informan dari Kodim menyampaikan bahwa Babinsa diarahkan untuk selalu hadir dalam kelompok tani

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

binaan, tidak hanya memberikan bantuan teknis, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap program pangan. Di tingkat desa, Babinsa dan penyuluh pertanian berperan sebagai fasilitator lapangan. Observasi peneliti menunjukkan bagaimana Babinsa membantu membuka lahan bersama petani, sementara PPL memberikan arahan teknis mengenai metode tanam dan penggunaan pupuk. Peran ganda ini membuat kolaborasi lebih mudah diterima masyarakat karena kepemimpinan tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga hadir dalam kehidupan sehari-hari petani.

Selain itu, penelitian juga menemukan hambatan berupa rotasi pejabat militer dan pergantian aparat sipil yang terkadang membuat kesinambungan program terganggu. Beberapa Babinsa mengambil inisiatif teknis tanpa dukungan administratif yang jelas, sehingga menimbulkan kebingungan dalam hal pembagian tanggung jawab. Kondisi ini menegaskan bahwa kepemimpinan fasilitatif telah bekerja dengan baik, tetapi perlu didukung aturan yang jelas agar tidak bergantung pada inisiatif individu semata.

Dari sisi desain institusional atau *institutional design*, penelitian menemukan bahwa kerangka aturan kolaborasi masih belum sepenuhnya mapan. Secara formal, pelaksanaan kegiatan didukung oleh surat tugas, berita acara, serta laporan program yang disusun pemerintah daerah. Namun, dalam praktiknya, banyak mekanisme diatur secara informal.

Salah satu temuan observasi menunjukkan bahwa untuk memastikan status lahan yang akan digarap, dibuat surat pernyataan yang ditandatangani kepala dusun atau kepala desa sebagai jaminan bahwa lahan “*clear and clean*”. Praktik ini membantu mengurangi potensi sengketa, tetapi menunjukkan lemahnya aturan formal yang lebih permanen. Tidak adanya PKS teknis yang mengatur secara rinci pembagian tugas antara Pemda dan Kodim membuat banyak keputusan dilakukan secara insidental. Padahal, perjanjian semacam itu sangat penting untuk menetapkan pembiayaan, mekanisme pemeliharaan alat pertanian, serta pengaturan distribusi hasil. Beberapa forum

*Received : 22 Sept 2025*

*Accepted : 12 Okt 2025*

*Published : 23 Okt 2025*

---

koordinasi memang sudah terbentuk, seperti brigade pangan desa, namun sifatnya belum rutin dan lebih banyak bergerak berdasarkan kebutuhan sesaat. Ketiadaan desain institusional yang terperinci ini membuat kolaborasi rentan bergantung pada individu dan momentum politik, sehingga keberlanjutannya belum terjamin.

Dimensi terakhir adalah proses kolaborasi atau *collaborative process*, yang menggambarkan bagaimana rangkaian kegiatan direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi. Penelitian menunjukkan bahwa proses dimulai dengan identifikasi lokasi lahan yang akan digarap, dilanjutkan dengan pembentukan organisasi pelaksana di tingkat desa, penyiapan tenaga Babinsa dan penyuluh, serta pengolahan lahan hingga kegiatan tanam. Tahapan ini terekam dalam sejumlah laporan program yang diamati peneliti. Implementasi lapangan mencakup program penanaman jagung secara bertahap dengan pengukuran kuartalan, tumpangsari pada lahan seluas puluhan hektare, serta pembangunan demplot padi di desa percontohan.

Hasil observasi menunjukkan bahwa program ini mampu meningkatkan luas tanam dan produktivitas di beberapa titik, meskipun skalanya masih terbatas. Monitoring dilakukan secara rutin melalui laporan Babinsa dan PPL, namun evaluasi lebih sering bersifat administratif tanpa tindak lanjut kebijakan yang jelas. Hambatan dalam proses ini juga teridentifikasi, antara lain keterbatasan alat pertanian, keterlambatan distribusi input produksi, dan perbedaan arahan teknis antara Babinsa dan penyuluh yang membingungkan petani.

Beberapa solusi yang telah dilakukan adalah pelatihan Babinsa oleh PPL, kerja sama dengan pihak swasta untuk penyediaan sarana produksi, serta forum pra-musim tanam untuk menyamakan langkah. Meski demikian, proses kolaborasi masih memerlukan penguatan agar evaluasi tidak hanya berhenti pada laporan administratif, melainkan menghasilkan pembelajaran institusional yang terstruktur.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa kolaborasi Pemerintah Daerah Kubu Raya dan Kodim 1207/Pontianak berjalan nyata melalui berbagai program ketahanan pangan, namun kualitasnya masih dipengaruhi oleh kondisi awal yang belum ideal, kepemimpinan fasilitatif yang sangat bergantung pada individu, desain institusional yang lemah, serta proses kolaborasi yang cenderung bersifat praktis daripada strategis. Temuan ini menegaskan relevansi kerangka teori Ansell dan Gash (2008) dalam membaca dinamika kolaborasi, serta memberikan dasar bagi rekomendasi untuk memperkuat perjanjian formal, meningkatkan kapasitas penyuluh dan Babinsa, dan membangun forum evaluasi berkelanjutan agar kolaborasi ketahanan pangan dapat menjadi strategi jangka panjang yang stabil dan efektif.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menemukan bahwa kolaborasi Pemda Kubu Raya dengan Kodim 1207/Pontianak dalam bidang ketahanan pangan telah berjalan melalui sejumlah program nyata, seperti pendampingan petani, pemanfaatan lahan tidur, dan penguatan distribusi pangan. Kolaborasi ini memberi dampak positif terhadap peningkatan produktivitas pertanian dan penguatan kapasitas petani lokal.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah hambatan, terutama terkait keterbatasan anggaran, kurangnya harmonisasi SOP antar lembaga, serta kendala komunikasi lintas sektor. Hambatan tersebut membuat efektivitas kolaborasi belum sepenuhnya optimal. Meski demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan TNI melalui Kodim 1207/Pontianak dapat menjadi faktor penguat bagi pemerintah daerah dalam mengatasi keterbatasan sumber daya.

Secara teoretis, penelitian ini memperluas penerapan collaborative governance dalam konteks non-tradisional, sementara secara praktis memberi masukan strategis bagi penguatan sinergi sipil–militer dalam pembangunan ketahanan pangan daerah.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

## **SARAN**

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran yang dapat disampaikan, diantaranya :

*Pertama*, diperlukan penyusunan SOP terpadu antara Pemda Kubu Raya dan Kodim 1207/Pontianak yang mengatur mekanisme kerja sama dalam bidang ketahanan pangan, mulai dari tahap perencanaan, implementasi, hingga evaluasi.

*Kedua*, perlu dibentuk forum koordinasi permanen di tingkat kabupaten yang melibatkan pemerintah daerah, Kodim, penyuluh pertanian, sektor swasta, dan kelompok tani. Forum ini dapat menjadi wadah komunikasi, koordinasi, sekaligus monitoring bersama.

*Ketiga*, integrasi data ketahanan pangan perlu diperkuat melalui sistem informasi terpadu yang dapat diakses oleh Pemda, Kodim, dan pemangku kepentingan lain. Sistem ini akan mempercepat identifikasi masalah dan distribusi bantuan pangan.

*Keempat*, latihan bersama dan program pendampingan terpadu antara Babinsa dan penyuluh pertanian harus diperbanyak. Kegiatan ini akan memperkuat kepercayaan, meningkatkan kompetensi teknis, serta memperluas cakupan layanan kepada petani.

*Kelima*, perlu ditingkatkan keterlibatan masyarakat dan sektor swasta dalam program ketahanan pangan. Kolaborasi multi-aktor akan menjamin keberlanjutan program sekaligus meningkatkan kemandirian pangan di tingkat lokal.

## **REFERENSI**

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>

Effendy, I. (2025). *Sinergitas Pemerintah Daerah DKI Jakarta dengan Kodam Jaya dalam Penanggulangan Bencana Banjir* [Tesis Magister]. Universitas Pertahanan RI.

*Received : 22 Sept 2025*

*Accepted : 12 Okt 2025*

*Published : 23 Okt 2025*

---

Food and Agriculture Organization. (1996). *Rome Declaration on World Food Security*.  
FAO.

Ismana, J. I. (2025). *Kolaborasi Pemerintah Daerah dengan Kodim 1207/Pontianak dalam Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat* [Tesis Magister]. Universitas Pertahanan RI.

Nasution, B. I., Yusuf, R., & Hartono, D. (2022). Urban vulnerability to floods: An investigation in Jakarta. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 68, 102723. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2021.102723>

Thomson, A. M., & Perry, J. L. (2006). Collaboration processes: Inside the black box. *Public Administration Review*, 66(1), 20–32. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00663.x>